

KAWASAN TIMUR INDONESIA : MEMACU INVESTASI, MENDOBRAK DISPARITAS



SYAMSUL HIDAYAT
Mahasiswa Fakultas
Ekonomi UGM
Angkatan '95

PENDAHULUAN

Salah satu agenda pembangunan adalah *go to East*, maksudnya prioritas pembangunan yang diarahkan pada pembenahan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Terasa sekali selama ini bahwa ketimpangan pembangunan telah menghasilkan disparitas kawasan yang cukup lebar, dimana tingkat kesejahteraan rakyat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) meninggalkan KTI. Agenda *go to East* ini ternyata cukup membawa hasil terutama pada lima tahun terakhir terjadi perubahan berarti. Untuk lebih mensejajarkan kondisi KTI dan KBI mau tidak mau pembangunan di KTI harus lebih diintensifkan, tentunya membawa konsekuensi penyerapan dana yang besar. Dana dari sektor pemerintah dapat dipastikan sangat terbatas dan tidak akan mencukupi, oleh karena itu peranan sektor swasta baik domestik maupun luar negeri sangat dibutuhkan melalui penanaman modal.

Masalahnya, bagaimana merangsang minat investor baik dalam Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk masuk ke kawasan timur Indonesia?. Dilihat dari sumber daya alam (*natural resources*) KTI memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Tersebar di tiga belas propinsi, mencakup pulau Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Nusa Tenggara, Maluku, dan Timor Timur. Namun ternyata belum menarik investor untuk menggarapnya, hal ini disebabkan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh investor akan *go to East*.

BEBERAPA INDIKATOR

Dalam kurun waktu 1990-1995, secara umum beberapa indikator ekonomi dan sosial lainnya di KTI telah mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Dari data-data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi tiga belas propinsi di KTI, mengalami peningkatan rata-rata diatas 7,8 persen pada kurun waktu 1994-1995. Meskipun pertumbuhan ekonomi cukup tinggi tetapi masalah kemiskinan masih menjadi problema utama di KTI. Kecuali Sulawesi Utara, dua belas propinsi lainnya dikategorikan kondisinya miskin. Kasus yang ekstrem terjadi di propinsi NTT yang hampir

setengah penduduknya hidup dalam kemiskinan. Dalam terminologi desa miskin, proporsi desa miskin di Irian Jaya merupakan yang tertinggi

Expectancy at Birth) tertinggi dicapai oleh Kalimantan Tengah (66,35), sedangkan yang terendah dicapai oleh propinsi Timor Timur

INDIKATOR INVESTASI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA		
PROPINSI	PROSENTASE TERHADAP TOTAL INVESTASI INDONESIA (1967-1996)	
Nusa Tenggara Barat	1,23	
Nusa Tenggara Timur	0,33	
Timor Timur	0,17	
Kalimantan Barat	4,33	
Kalimantan Tengah	1,40	
Kalimantan Selatan	3,17	
Kalimantan Timur	6,94	
Sulawesi Utara	1,88	
Sulawesi Tengah	1,15	
Sulawesi Selatan	5,38	
Sulawesi Tenggara	0,54	
Maluku	1,58	
Irian Jaya	5,42	

yaitu 78 persen, disusul Timor-Timur (71 persen) dan Maluku (51 persen).

Dari sektor kesehatan, tingkat kematian bayi perseribu kelahiran atau *Infant Mortality Rate (IMR)* dan *Children Mortality Rate (CMR)*. Pada tahun 1995, angka IMR tertinggi dicapai oleh NTB dengan 101 kematian bayi, disusul Kalimantan Selatan (72) dan Sulawesi Selatan (71). Sedangkan CMR untuk nasional adalah 81 pada 1993, kecuali Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur semua propinsi di KTI mempunyai CMR lebih besar. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 1995 angka harapan hidup nasional adalah 63,4 tahun, angka harapan hidup pada waktu lahir (*Life*

(53,5).

Dari data pendidikan diperoleh bahwa tingkat melek huruf (*illiterate rate*), pada tahun 1994 tertinggi di Timor Timur (50,41 persen), disusul NTB (28,39 persen), sedangkan yang paling rendah dicapai oleh Sulawesi Utara (2,75 persen) dan Maluku (4,61 persen). Salah satu indikator komposit obyektif yang dikenal secara luas sebagai Indeks Mutu Hidup (*Physical Quality of Life Index - PQLI*) yang merupakan gabungan dari tiga indikator tunggal tunggal yaitu IMR, CMR dan Illiterate rate, menunjukkan bahwa tahun 1990 angka PQLI

Indonesia adalah 73 kecuali Sulawesi Utara angka PQLI propinsi lain berada di bawah angka rata-rata nasional. Angka indeks terendah terdapat di propinsi NTB yaitu 47 disusul Timor Timur (55). Melihat indikator diatas dapat diketahui meskipun telah terjadi perbaikan selama ini namun dibandingkan dengan rata-rata nasional, tingkat kesejahteraan penduduk di KTI masih jauh dari yang diharapkan.

KENDALA INVESTASI

Dapat diidentifikasi sekurang-kurangnya ada tujuh kendala di KTI. Kendala itu merupakan kendala klasik yang sudah lama disebut-sebut : pertama, luasnya kawasan timur Indonesia mencakup 68, 4 persen dari luas Indonesia, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 35 juta jiwa atau hanya 17,7 persen populasi Indonesia. Kedua, tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung, termasuk di dalamnya jalan, jembatan, listrik, pelabuhan, dan alat transportasi. Ketiga, kurangnya informasi peluang usaha di sektor potensial. Selama ini, investor tidak mengetahui secara jelas sektor-sektor mana yang potensial dapat digarap. Kurangnya informasi ini dikarenakan belum aktifnya Pemda di KTI untuk mempromosikan daerahnya baik di dalam maupun di luar negeri.

Kendala keempat, terbatasnya kemampuan dunia usaha setempat untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada dan belum berkembangnya kemitraan usaha antar pelaku ekonomi, pegusaha kecil, menengah, dan besar. Kelima, belum memadainya kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi. Keenam, kegiatan investasi cenderung didominasi oleh sektor primer, sehingga belum ada keseimbangan struktur industri, dan ketujuh, belum terorganisasinya kerja pengurusan perizinan

didaerah-daerah KTI.

Jika diperhatikan lebih seksama maka dapat dikemukakan selain kendala diatas masih banyak kendala-kendala lain seperti rasio konsentrasi investasi (*Concentration-Ratio* = *CR*). Dari penelusuran investasi baru PMA dan PMDN di KTI pada tahun 1995 dan 1996, dapat disimpulkan bahwa CR-5 rata-rata 51 persen, artinya total investasi dari lima proyek terbesar menguasai lebih dari 51 persen total investasi (**Beni Sindurata**). Di Sulawesi CR - 5 berkisar antara 73,8 persen sampai 96,4 persen. Di Kalimantan antara 51 sampai 61 persen, sedangkan di Nusa Tenggara, Timor Timur, dan Maluku diatas 9,8 persen. Hal ini berbeda dengan pulau Sumatera dan Jawa yang lebih menyebar.

Selain itu, masih terkait dengan SDM dan perizinan, oleh **Ben Mbou** seorang mantan Gubernur NTT memasukkan sikap kepemimpinan yang kurang, bahkan beliau juga mensinyalir bahwa kesenjangan antara kawasan barat dan timur juga merupakan cerminan perbedaan kualitas kepemimpinan.

Namun dari permasalahan diatas agenda terbesar dan yang paling mendasar adalah penyediaan prasarana dan sarana, kualitas SDM, serta masalah birokrasi perizinan. Rendahnya kualitas SDM dan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung ditambah tidak efisiennya birokrasi dan perizinan menyebabkan rendahnya tingkat efisiensi investasi yang ditunjukkan dengan tingginya ICOR (*Incremental Capital - Output Ratio*)

Seiring dengan kendala-kendala tersebut dan implikasinya terhadap pengembangan investasi di KTI, data BPKM menunjukkan, persetujuan investasi dan realisasinya di KTI jauh lebih rendah, baik dalam PMDN maupun PMA.

Secara kumulatif untuk PMA dalam kurun waktu 1967 - Desember 1996 bernilai US\$ 24.349,2 juta atau 14,02 persen dengan 356 proyek atau 7,35 persen dari total Indonesia. Demikian juga untuk PMDN, dalam kurun yang sama prosentasi investasi di KTI dibanding total Indonesia hanya 19,25 persen atau senilai Rp 92.082,5 milyar dengan jumlah proyek 1573 atau 15,16 persen, selebihnya ada di kawasan barat. Untuk angka realisasi juga jauh lebih rendah. Dalam kurun waktu 1 April 1994 hingga 30 Juni 1996 realisasi PMDN di KTI adalah 11,82 persen dari 256 proyek dengan nilai Rp. 42.263,3 milyar dan PMA sebesar 11,75 persen dari 102 proyek dengan nilai investasi US\$ 16.890,7 juta.

Usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut : Pertama, mempercepat pembangunan prasarana dan

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan melalui program pemagangan. Ketiga, memperlancar dan menyederhanakan proses perolehan izin yang diperlukan dan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan penciptaan iklim yang kondusif. Keempat, mengusahakan tambahan perangsang khusus bagi investasi di KTI. Kelima, menentukan dan menetapkan kawasan andalan di setiap propinsi sebagai usaha untuk mempercepat pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi ekonomi daerah itu. Keenam, memberikan fasilitas khusus yaitu penyusutan dan amortisasi alat-alat yang dipercepat, kompensasi kerugian sampai dengan sepuluh tahun, pungutan Pajak Penghasilan (PPH) atas sisa laba, keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lima puluh persen selama delapan tahun sejak izin diperoleh untuk penentuan tanah dan kelongggaran dalam

PERSETUJUAN DAN REALISASI INVESTASI DI KBI DAN KTI
(1 APRIL 1994 - 30 JUNI 1996)

		PERSETUJUAN		REALISASI	
		KBI	KTI	KBI	KTI
PMDN	Proyek	1.617	256	40,26	40,63
	Investasi *	128.496,1	42.264,3	37,57	11,82
PMA	Proyek	1.647	102	28,96	26,47
	Investasi**	63.441,1	16.890,7	21,88	11,75

catatan *) milyar rupiah **) juta dollar AS

Sumber : Kantor menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

sarana di KTI Kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan mendirikan BLK (Balai Latihan Kerja) di berbagai daerah yang

penggunaan tenaga kerja asing. Ketujuh, tambahan kemudahan lain yang sedang diusahakan adalah menyederhanakan administrasi

dan kemudahan memperoleh perizinan, kemudahan lain dibidang tata niaga, keimigrasian, ketenagakerjaan, perhubungan dan perbankan.. Secara umum untuk mnegkoordinasikan kebijakan di KTI dan pembangunan ekobnomi secara keseluruhan pemerintah telah membentuk Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP -KTI) dengan keluarnya Keppres RI no 120 tahun 1993 dan kepres-kepres yang berkaiatan yaitu Keppres no 27 tahun 1994 dan Keppres no 54 tahun 1995.

ALTERNATIF STRATEGI

Sebenarnya tujuan utama investor baik dalam maupun luar negeri menanamkan modalnya di KTI adalah untuk memperoleh *rate of return* (keuntungan) yang tinggi. Rate of return ini ditentukan dua variabel ini, variabel yang paling diperhatikan adalah biaya (pengorbananan) karena dengan biaya baru didapat penerimaan. Biaya pada dasar biaya terbagi dua, yaitu biaya proses produksi dan biaya di luar produksi . Dalam Kondisi KTI sekarang ini baik biaya proses produksi maupun biaya diluar produksi sangatlah tinggi. Misalnya selama produksi , akibatnya rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadikan biaya yang ditanggung lebih besar dari hasil produktivitas yang diterima . Sedangkan diluar proses produksi, biaya perizinan, dan biaya administrasi disertai pungutan-pungutan lain menjadikan biaya tinggi . Akibatnya untuk berhasil di KTI investor harus menemukan adanya ekonomi biaya tinggi.

Kebijakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat hendaknya bertujuan untuk mengurangi tingginya biaya investasi di KTI. dan beberapa alternatif kebijaksana yang dapat diambil oleh pemtintah untuk ekonomi biaya tinggi itu:

1. Pembangunan infrastrukur hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan investor KTI karenanya dengan melakukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta investor untuk membangun prasara dan sarana, Dengan adanya informasi yang didapat oleh pemerintah dari investor dan calon-calon investor menjadikan kebijakan pembangunan infrastruktur akan lebih tepat dan efisien.. Cara lain adalah dengan memberikan subsidi bagi permbangunan infrastruktur bagi investor yang hendak memulai investasinya (*strart up subsidies*).
2. Selain insentif fiskal yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, insentif non fiskal seperti fasilitas kredit dengan bunga rendah juga sangat mendorong masuknya investasi di KTI.
3. Subsidi bagi pelatihan tenaga kerja dan litbang (penelitian asdan pengembangan) perlu juga menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong pengembangan investasi di KTI . Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa investor ssbelum m,ngutahui kebutuhan ketrampilan tenaga kerja yang diinginkannya daripada pemerintah.
4. Menghapuskan pungutan pungutan yang menyebabkan tidak efisiennya biaya investasi. Agaknya dengan deregulasi 7 Juli 1997 yang salah satu kebijakannya adalah tentang pajak daerah dan restribusi daerah yang disederhanakan patut kita sambut baik . Namun hal ini tidak efektif jika pengawasan yang dilakukan tidak berjalan baik. Akibatnya pungutan-pungutan itu tetap ada , oleh karena itu pengawasan melekat dapat dilakukan oleh pemda untuk menannngakal adanaya pungutan-pungutan liar.

5. Satu hal lagi perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah perlakuan yang sama terhadap investasi lokal atau luar negeri ataupun investor besar dengan yang investor menengah dan kecil. Ini untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan oleh investor besar, sedangkan investor menengah dan kecil tidak diberi kesempatan untuk menikmati fasilitas
6. Perlindungan investasi dari kekacauan politik. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang misalnya sedikit banyak akan menjadikan investor merasa cemas menanamkan modalnya di Indonesia pada umumnya dan KTI pada khususnya.

Kesimpulannya dengan kebijakan-kebijakan yang diatas saya harap akan mendorong investasi di KTI. Dengan banyaknya investor yang *go to East* ini akan menjadikan KTI bukan saja dapat mensejajarkan dirinya dengan KBI tetapi juga menjadi tulang punggung perekonomian nasional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Dougall, Herbert E, *Investment*, 1969, 8 th ed,

Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliff,
New Jersey.

Fry, Earl H, *The Politics of International Investment*, 1983, Mc Graw-Hill, Inc.

Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1995

Kompas, berbagai edisi

Republika, berbagai edisi

Statistik Indonesia, tahun 1995